



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Sudah Siapkah Indonesia Menuju Masyarakat Madani Dalam Konsep Demokrasi di Medan Sumatera Utara

Is Indonesia Ready to Move Towards a Civil Society in the Concept of Democracy in Medan, North Sumatra

Masrul Zuhri^{1*}, Tri Dela Puspita², Widia Lestari³, Abellia Putri⁴, Nuraini⁵, Tazla Nia Fareby⁶, Tri Sisty Annisa Sinaga⁷, Delina Yanti⁸, Nabila Wahyuni⁹, Dwi Rizky Sidabalok¹⁰, Nurita Oktapia Br Simanjuntak¹¹, Afrida Dina Pratiwi¹²

¹UIN Sumatera Utara, masitama10@gmail.com

²UIN Sumatera Utara, delapuspita3549@gmail.com

³UIN Sumatera Utara, widialestari6451@gmail.com

⁴UIN Sumatera Utara, abelliaputri89@gmail.com

⁵UIN Sumatera Utara, nurainilimang05@gmail.com

⁶UIN Sumatera Utara, farebytazlania@gmail.com

⁷UIN Sumatera Utara, anisasinaga2005@gmail.com

⁸UIN Sumatera Utara, delina7@gmail.com

⁹UIN Sumatera Utara, nabilawhy05@gmail.com

¹⁰UIN Sumatera Utara, dwisidabalok@gmail.com

¹¹UIN Sumatera Utara, nuritaokta@gmail.com

¹²UIN Sumatera Utara, dinapratiwiafrida@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: masitama10@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 7 July, 2024

Revised: 7 Sept, 2024

Accepted: 20 Oct, 2024

Kata Kunci:

Masyarakat Madani,
Demokrasi Indonesia, Politik
Indonesia, Penelitian
Kuantitatif

Keywords:

Civil Society, Indonesian
Democracy, Indonesian

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi kesiapan Indonesia untuk menjadi masyarakat madani dalam konteks negara demokrasi, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta persepsi masyarakat tentang peran masyarakat madani. Metode yang digunakan adalah *kuantitatif* dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuisisioner via google form yang mana terdiri dari 16 pertanyaan yang berisi tentang pernyataan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini ditujukan kepada 66 responden secara acak yang terdiri dari 69,7 % perempuan dan 30,3 % laki-laki. Hasil menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesiapan yang bervariasi dalam mendukung nilai-nilai masyarakat sipil. Meskipun ada yang merasa siap, tantangan seperti korupsi, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya kebebasan berekspresi masih signifikan. Sebagian besar responden memahami konsep masyarakat madani (50%) dan demokrasi (51,5%), serta pentingnya peran masyarakat madani dalam demokrasi. Namun, partisipasi dalam organisasi masyarakat masih rendah (31,8%), dan kepercayaan terhadap lembaga negara juga rendah (21,2% percaya). Faktor utama yang menghambat adalah korupsi (69,7%), ketimpangan ekonomi (51,5%), dan rendahnya pendidikan (57,6%). Rekomendasi untuk memperkuat masyarakat madani mencakup pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, dan pendidikan politik. Meskipun penuh tantangan, ada optimisme terhadap masa depan masyarakat madani di Indonesia.

ABSTRACT

This research evaluates Indonesia's readiness to become a civil society in the context of a democratic country, identifying supporting and inhibiting factors, as well as public perceptions

about the role of civil society. The method used is quantitative with the data collection technique in this research namely using a questionnaire via Google Form which consists of 16 questions containing statements that are in accordance with the objectives of this research addressed to 66 random respondents consisting of 69.7% women and 30.3% male. The results show that Indonesian society has varying readiness to support civil society values. Even though some feel ready, challenges such as corruption, economic inequality, and lack of freedom of expression are still significant. Most respondents understand the concepts of civil society (50%) and democracy (51.5%), as well as the important role of civil society in democracy. However, participation in community organizations is still low (31.8%), and trust in state institutions is also low (21.2% trust). The main inhibiting factors are corruption (69.7%), economic inequality (51.5%), and low education (57.6%). Recommendations for strengthening civil society include eradicating corruption, fair law enforcement, and political education. Despite the challenges, there is optimism for the future of civil society in Indonesia.

PENDAHULUAN

Masyarakat sipil dianggap sebagai pilar utama dalam terbentuknya peradaban nasional yang ideal bagi kehidupan modern. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti lembaga demokrasi, pelestarian budaya, dan aspek penting kemanusiaan.¹ Secara etimologis, masyarakat sipil dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal, kemandirian, kebebasan, toleransi, dan kebersamaan. Rahardjo menjelaskan bahwa landasan utama masyarakat sipil adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada pandangan hidup yang menghindari konflik dan permusuhan yang memecah belah, serta mengedepankan kehidupan persaudaraan.

Azyumardi Azra menyatakan bahwa hakekat masyarakat madani bukan sekadar gerakan pro-demokrasi, melainkan juga mencakup pembentukan masyarakat berkualitas dan ber-tamaddun (beradab). Ciri-ciri masyarakat yang ber-tamaddun meliputi tingginya toleransi, kesediaan individu untuk menerima beragam pandangan politik dan perilaku sosial, serta memiliki moralitas yang tinggi.² Masyarakat madani dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Konsep masyarakat madani bukanlah suatu teori kuno yang eksklusif, melainkan sebuah konsep yang senantiasa hidup dan dapat berkembang dalam setiap ruang dan waktu.

Masyarakat sipil mempunyai berbagai karakteristik yang tidak dapat diabaikan. Ciri-ciri masyarakat sipil antara lain:

1. Adanya ruang publik yang memberikan kebebasan kepada masyarakat (warga negara) untuk menyampaikan gagasan dan pendapat serta berkarya melalui individu, kelompok, dan media informasi.
2. Adanya pola hidup demokratis dimana warga negara selalu berperilaku sopan dalam pergaulan sosial tanpa merasa dikekang atau ditekan oleh pihak, dan perilaku tersebut bermula dari rasa percaya diri yang tinggi.
3. Bersikap toleran dalam masyarakat yang penuh dengan pola hidup yang beragam.
4. Mengutamakan perilaku yang beradab untuk menciptakan lingkungan hidup yang aman dan tenteram serta selalu menjaga sikap pluralistik.

¹ Syamsul Mujahidin. "Masyarakat Madani Dan Politik Demokrasi Indonesia Telaah Singkat Civil Society Dalam Pendekatan Sosiologi Politik". POLITEA: Jurnal Politik Islam, 4(2), 2021, hal. 2.

² Kunawi Basyir. Mengapa Masyarakat Madani Di Bumi Seribu Pura (Surabaya: CV. Global Aksara Pers, 2023), hal. 2-3.

5. Menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan guna menyeimbangkan kehidupan bermasyarakat.³

Negara harus memiliki sistem demokrasi agar masyarakat sipil dapat melakukan perannya. Untuk demokrasi dapat berfungsi dengan baik, masyarakat harus memberikan dukungan dan menerapkan prinsip-prinsipnya. Dengan kata lain, pemerintahan yang kuat dan masyarakat sipil yang terkonsolidasi yang berfungsi sebagai penyeimbang negara adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Masyarakat beradab, atau masyarakat madani, diperlukan untuk membangun masyarakat demokratis. Semangat madaniyah, atau keadaban, terdapat dalam jiwa masyarakat madani. Ini adalah sikap pribadi dan sosial yang sadar bahwa diri sendiri tidak selalu benar dan tidak ada jawaban yang benar untuk setiap masalah.⁴

Demokrasi adalah sebuah istilah yang menggambarkan pengelolaan pemerintahan negara yang berlandaskan pada pengakuan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani: "*demos*" yang berarti rakyat, dan "*kratos*" atau "*kratein*" yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat atau kekuasaan di tangan rakyat (Budiardjo, 1982:50).⁵

Negara merupakan suatu organisasi yang meliputi wilayah, masyarakat, dan pemerintah (Ramadan, 2020). Disebut organisasi karena terdapat struktur seperti presiden yang didukung oleh wakil presiden dan para menteri. Terbentuknya suatu bangsa memerlukan tiga syarat utama: wilayah, masyarakat, dan pemerintahan. Setiap negara memiliki sistem atau bentuk pemerintahan yang berbeda, termasuk oligarki, anarki, kediktatoran, dan demokrasi. Dalam kehidupan bernegara, sistem pemerintahan sangat diperlukan untuk mengarahkan dan menjadi pedoman umum bagi seluruh rakyat. Jenis sistem pemerintahan pun bervariasi sesuai kebutuhan masing-masing negara. Di antara berbagai sistem yang ada, sistem pemerintahan demokrasi adalah yang paling sering dianut dan umum digunakan.

Demokrasi pertama kali muncul pada zaman Yunani Kuno, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah (Subroto, 2022). Sistem pemerintahan ini lahir karena masyarakat ingin membebaskan diri dari ideologi feodalisme yang dianggap tidak adil dalam pembagian kekuasaan. Demokrasi menjadi jalan untuk melakukan perubahan dari masa lampau, mengembalikan hak untuk memilih pemimpin kepada rakyat, dan menempatkan penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi. Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang

³ Mughniatul Ilma, & Rifqi Nur Alfian. (2020). "*Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Bingkai Pendidikan Islam*". MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam, 1(1), 2020, hal. 25.

⁴ Budi Juliardi. "*Demokrasi dan Masyarakat Madani*". Jurnal BAKABA, 8(2), 2020, hal. 76.

⁵ Dr. Drs. HYRONIMUS ROWA, M.Si. (2015). DEMOKRASI DAN KEBANGSAAN INDONESIA (Jatinagor: INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI, 2015), hal. 10.

demokratis dalam masyarakat yang plural (Astuti, 2020).⁶

Sejak penerapan reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah melalui perjalanan Panjang dalam membangun demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan (Abdoellah, 2016). Meskipun demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, khususnya terkait kebebasan sipil dan hak asasi manusia, banyak kemajuan telah dicapai dalam memperkuat Lembaga-lembaga demokrasi, mendorong partisipasi warga negara, dan membangun Masyarakat yang lebih inklusif dan pluralistic. Tentu saja, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya, komitmen dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, Masyarakat sipil, dan sektor swasta.⁷

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *kuantitatif*, yang mana metode *kuantitatif* ini merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data numerik dan statistik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk numerik (angka) dari pada naratif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuisisioner via google form yang mana terdiri dari 16 pertanyaan yang berisi tentang pernyataan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang kami buat, kami membagikan nya kepada 66 responded secara acak yang terdiri dari 69,7 % perempuan dan 30,3 % laki-laki.

Kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data yang bersifat statistik. Data *kuantitatif* adalah data yang dapat diukur dan dihitung secara langsung, mengenai informasi atau penjelasan dalam bentuk angka atau statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

HASIL

Tabel 1. Data karakteristik responden

Karakteristik	N	%
Usia		
< 18 tahun	6	9,1
18 - 25 tahun	55	83,3
26 - 35 tahun	2	3
36 - 45 tahun	2	3
> 45 tahun	1	1,5
Jenis Kelamin		
Laki-laki	20	30,3
Perempuan	46	69,7
Pendidikan Terakhir		
SD/SMP	1	1,5
SMA/SMK	48	72,7
Diploma	3	4,5
Sarjana	14	21,2
Pascasarjana	-	-

⁶ Christopher E. Manurung, Christy Zee, Nicholas Nathanael, & Ryan Ernando. "Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk Kehidupan di Tahun 2022". Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, 1(1), 2022, hal. 3.

⁷ Arman Rohmatillah, Moh. Sa'diyin, & Ahmad A. Zaini. (2023). "Tantangan dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia". JOSh: Journal of Sharia, 2(2), 2023, hal. 98.

Pekerjaan		
Pelajaran/Mahasiswa	51	77,3
Pegawai negeri	-	-
Pegawai swasta	5	7,6
Wirausaha	3	4,5
Ibu Rumah Tangga	1	1,5
Mekanik	1	1,5
Pengacara	1	1,5
Oprator	1	1,5
Admin	1	1,5
Tidak bekerja	1	1,5

Berdasarkan Tabel 1. Menunjukkan bahwa umur sebagian besar responden berada dalam rentang usia 18-25 tahun (83,3%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah generasi muda atau dewasa muda. Jenis kelamin mayoritas responden adalah perempuan (69,7%), sementara laki-laki hanya 30,3%. Ini menunjukkan adanya dominasi partisipasi perempuan dalam survei ini. Pendidikan terakhir sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK (72,7%), diikuti oleh pendidikan sarjana (21,2%b). Jumlah yang telah menempuh pendidikan diploma sangat sedikit (4,5%), dan hanya 1 orang yang memiliki pendidikan terakhir SD/SMP. Tidak ada responden yang memiliki pendidikan pascasarjana.

Mayoritas responden adalah pelajar atau mahasiswa (77,3%), yang mendukung temuan bahwa mayoritas berada dalam rentang usia 18-25 tahun. Pekerjaan lainnya tersebar secara merata dengan jumlah kecil pada masing-masing kategori: pegawai swasta (7,6%), wirausaha (4,5%), dan beberapa pekerjaan lainnya seperti mekanik, ibu rumah tangga, pengacara, operator, dan admin masing-masing hanya diwakili oleh 1 orang (1,5%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah generasi muda perempuan dengan pendidikan terakhir SMA/SMK, yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Hal ini mungkin mencerminkan populasi tertentu yang sedang diteliti atau ditargetkan oleh survei ini.

Kesiapan Masyarakat Indonesia dalam Mendukung Nilai-Nilai Masyarakat Madani dalam Konteks Demokrasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa masyarakat Indonesia menunjukkan tingkat kesiapan yang berbeda-beda untuk mendukung nilai-nilai masyarakat sipil dalam konteks demokrasi. Beberapa pihak yakin bahwa mereka sudah siap dan telah menunjukkan komitmen melalui partisipasi politik dan kesadaran akan hak asasi manusia, sementara yang lain yakin bahwa mereka belum siap karena tantangan seperti korupsi, kesenjangan, dan kurangnya kebebasan berekspresi masih ada. Secara keseluruhan, kemajuan telah dicapai, namun masih banyak yang harus diperbaiki untuk mencapai masyarakat sipil yang ideal.

Tabel 2. Tingkat Pengetahuan Responden Tentang Masyarakat Madani

Variabel	N	%
Seberapa paham Anda terhadap konsep masyarakat madani?		
Sangat paham	7	10,6

Paham	33	50
Cukup paham	20	30,3
Tidak paham	6	9,1
Seberapa paham Anda terhadap konsep demokrasi?		
Sangat paham	14	21,2
Paham	34	51,5
Cukup paham	14	21,2
Tidak paham	4	6,2
Seberapa penting menurut Anda peran masyarakat madani dalam demokrasi?		
Sangat penting	25	37,9
Penting	26	39,4
Cukup penting	13	19,7
Tidak penting	-	-
Tidak tahu	2	3
Apakah Anda terlibat dalam organisasi masyarakat atau LSM?		
Ya	21	31,8
Tidak	45	68,2
Seberapa sering Anda mengikuti berita politik dan sosial?		
Setiap hari	14	21,2
Beberapa kali seminggu	16	24,2
Beberapa kali sebulan	6	9,1
Jarang	25	37,9
Tidak pernah	5	7,6
Seberapa sering Anda berpartisipasi dalam diskusi atau kegiatan politik?		
Sering	8	12,1
Kadang-kadang	24	36,4
Jarang	23	34,8
Tidak pernah	11	16,7
Menurut Anda, apakah sistem demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan dengan baik?		
Sangat baik	3	4,5
Baik	15	22,7
Cukup baik	26	39,4
Buruk	20	30,3
Sangat buruk	2	3
Apakah Anda merasa pemerintahan Indonesia cukup transparan dalam menjalankan tugasnya?		
Sangat transparan	3	4,5
Transparan	13	19,7
Cukup transparan	19	28,8
Tidak transparan	25	37,9
Sangat tidak terpercaya	6	9,1
Seberapa percaya Anda terhadap lembaga-lembaga negara (seperti KPU, DPR, MA)?		
Sangat percaya	2	3
Percaya	14	21,2
Cukup percaya	23	34,8
Tidak percaya	26	39,4
Sangat tidak terpercaya	1	1,5

Apa saja tantangan utama yang menurut Anda menghambat terwujudnya masyarakat madani di Indonesia?		
Korupsi	46	69,7
Ketimpangan ekonomi	34	51,5
Rendahnya pendidikan	38	57,6
Kurangnya partisipasi masyarakat	37	56,1
Budaya yang tidak mendukung demokrasi	21	31,8
Yang lain	5	7,6
Seberapa besar pengaruh media sosial terhadap demokrasi di Indonesia?		
Sangat Besar	38	57,6
Besar	21	31,8
Cukup besar	7	10,6
Kecil	-	-
Sangat kecil	-	-
Apakah Anda merasa kebebasan berpendapat dan hak pilih di Indonesia sudah terpenuhi?		
Sangat terpenuhi	5	7,6
Terpenuhi	15	22,7
Cukup terpenuhi	25	37,9
Tidak terpenuhi	19	28,8
Sangat tidak terpenuhi	2	3
Apa yang menurut Anda perlu dilakukan untuk memperkuat masyarakat madani di Indonesia?		
Pendidikan politik bagi masyarakat	33	50
Peningkatan transparansi pemerintah	35	53
Pemberantasan korupsi	42	63,6
Penguatan hukum dan keadilan	37	56,1
Peningkatan kesejahteraan ekonomi	37	56,1
Yang lain	3	4,5
Seberapa optimis Anda bahwa Indonesia dapat menjadi masyarakat madani dalam 10 tahun ke depan?		
Sangat optimis	8	12,1
Optimis	27	40,9
Cukup optimis	26	39,4
Pesimis	5	7,6
Sangat pesimis	-	-

Berdasarkan Tabel 2. Menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep masyarakat madani mayoritas respondennya (50%) paham tentang konsep masyarakat madani, 30,3% cukup paham, sementara 10,6% sangat paham, hanya 9,1% yang tidak paham. Pemahaman terhadap konsep demokrasi sebagian besar respondennya (51,5%) paham tentang konsep demokrasi, 21,2% sangat paham, dan 21,2% cukup paham, hanya 6,2% yang tidak paham. Pentingnya peran masyarakat madani dalam demokrasi ada 37,9% responden menganggap peran ini sangat penting 39,4% menganggap penting, dan 19,7% cukup penting, hanya 3% yang tidak tahu. Keterlibatan dalam organisasi masyarakat atau LSM, ada 31,8% terlibat, sementara 68,2% tidak terlibat. Frekuensi mengikuti berita politik dan sosial, ada 21,2% mengikuti berita setiap hari, dan 24,2% beberapa kali seminggu, 37,9% jarang mengikuti

berita, dan 7,6% tidak pernah. Frekuensi partisipasi dalam diskusi atau kegiatan politik, ada 12,1% sering berpartisipasi, dan 36,4% kadang-kadang, 34,8% jarang berpartisipasi, dan 16,7% tidak pernah.

Menurut responden persepsi terhadap sistem demokrasi di Indonesia, ada 4,5% menganggap sistem demokrasi sangat baik, dan 22,7% baik, 39,4% menganggap cukup baik, sementara 30,3% buruk, dan 3% sangat buruk. Transparansi pemerintahan Indonesia, 4,5% menganggap sangat transparan, dan 19,7% transparan, 28,8% cukup transparan, sementara 37,9% tidak transparan, dan 9,1% sangat tidak transparan. Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara ada 3% sangat percaya, dan 21,2% percaya, 34,8% cukup percaya, sementara 39,4% tidak percaya, dan 1,5% sangat tidak percaya. Tantangan utama yang menghambat masyarakat madani korupsi (69,7%), ketimpangan ekonomi (51,5%), dan rendahnya pendidikan (57,6%) adalah tantangan utama kurangnya partisipasi masyarakat (56,1%) dan budaya yang tidak mendukung demokrasi (31,8%) juga dianggap signifikan, 7,6% memilih tantangan lainnya. Pengaruh media sosial terhadap demokrasi di Indonesia mayoritas responden (57,6%) menganggap pengaruh media sosial sangat besar, 31,8% menganggap besar, dan 10,6% cukup besar. Kepuasan terhadap kebebasan berpendapat dan hak pilih, ada 7,6% merasa sangat terpenuhi, dan 22,7% terpenuhi, 37,9% merasa cukup terpenuhi, sementara 28,8% tidak terpenuhi, dan 3% sangat tidak terpenuhi. Tindakan untuk memperkuat masyarakat madani, ada 63,6% memilih pemberantasan korupsi, 56,1% penguatan hukum dan keadilan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi, 53% mendukung peningkatan transparansi pemerintah, dan 50% pendidikan politik bagi masyarakat, 4,5% memilih tindakan lainnya. Optimisme terhadap masa depan masyarakat madani di Indonesia, ada 12,1% sangat optimis, 40,9% optimis, dan 39,4% cukup optimis, 7,6% pesimis, dan tidak ada yang sangat pesimis.

Saran dan Komentar untuk Upaya Indonesia Menuju Masyarakat Madani

Dari hasil penelitian, menyimpulkan bahwa terdapat berbagai saran dan pendapat yang dapat menggerakkan Indonesia menuju masyarakat beradab, antara lain melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan, penguatan partisipasi politik, reformasi sistem politik, penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kesadaran warga negara akan keberagaman dan kesadaran hak asasi manusia. Rekomendasi juga mencakup perlunya peran aktif media, pemuda, teknologi informasi, dan semangat kebangsaan. Meski penuh tantangan, upaya ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju masyarakat yang lebih demokratis dan sipil

PEMBAHASAN

Istilah Masyarakat Madani pertama kali diperkenalkan oleh Dato Sri Anwar Ibrahim dalam sebuah simposium nasional yang diselenggarakan dalam festival Istiqlal pada 26 September 1995. Konsep ini awalnya berasal dari gagasan yang diajukan oleh Prof. Naquib al-Attas, seorang filsuf dari Malaysia. Setelah itu, istilah ini mulai diterima oleh beberapa intelektual Indonesia, termasuk Cak Nur, dalam artikel berjudul "Menuju Masyarakat Madani".

Dari sudut pandang kemanusiaan dan agama, konsep Masyarakat Madani menunjukkan kesamaan dengan Masyarakat Madinah pada masa Rasulullah. Namun, dalam konteks politik yang mencakup struktur pemerintahan, sistem pengawasan, dan faktor-faktor lainnya, Masyarakat Madani dan Civil Society memiliki kesamaan karena keduanya mewujudkan struktur kelembagaan, terutama dalam konteks kebijakan negara. yang secara langsung

mendukung penguatan sistem demokrasi Oleh karena itu, diskusi tentang Masyarakat Madani sebenarnya membahas demokrasi karena keduanya memiliki unsur, inti, dan tujuan yang serupa. Civil Society juga dipandang sebagai gabungan Individualisme Moral Durkheim dan konsep Rasionalitas Weber dalam bentuk institusi sosial modern, yang menjadi perhatian utama dalam studi filosofis yang menekankan nilai-nilai dan keyakinan.⁸

Di Indonesia, terdapat beragam pendapat tentang konsep Masyarakat Madani. Beberapa tokoh, seperti Nurcholish Madjid atau Cak Nur, berpendapat bahwa Masyarakat Madani di Indonesia sebaiknya lebih mengutamakan dimensi horizontal, dengan fokus pada pentingnya budaya dan toleransi antaragama. Sebagai tokoh utama dalam kelompok tersebut, pandangannya tentang Masyarakat Madani terinspirasi oleh organisasi Masyarakat Madinah pada masa Rasulullah. Baginya, Piagam Madinah memegang peran penting dalam sejarah umat manusia karena mengokohkan nilai-nilai pluralisme dan toleransi. Pandangan lain dari tokoh seperti Ryaas Rasyid dan Daniel Dhakidae, dalam upaya mereka untuk memajukan konsep ini, Masyarakat Madani menyoroti dimensi vertikal, yang melibatkan interaksi antara masyarakat dan negara, serta prinsip-prinsip otonomi dan kemandirian. Setiap pembahasan ini memunculkan pertanyaan tentang visi ideal mengenai bagaimana bentuk yang diharapkan dari masyarakat madani seharusnya terbentuk.. Namun, contoh tersebut kurang sesuai dengan situasi di Indonesia. Terkait dengan kerangka yang kedua, muncul pertanyaan tentang peran partai politik, elit, dan pengusaha dalam konsep Masyarakat Madani yang sedang dibahas. Secara teoritis, kritik semacam ini dimaksudkan untuk memastikan relevansi dan keselarasan konsep Masyarakat Madani dalam konteks Indonesia.

Jika diteliti lebih lanjut, ada kerangka yang lebih sesuai dalam konteks ini. Afan Gaffar, dalam bukunya "Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi," mempertimbangkan kembali pentingnya Civil Society atau Masyarakat Madani dengan tujuan menggabungkan dua konsep sebelumnya yang telah dibahas. Menurut pandangannya, Masyarakat Madani melibatkan interaksi vertikal antara berbagai kelompok dan kelas, sementara demokratisasi dan partisipasi erat terkait dengan dimensi horizontal. Dia mencatat bahwa kedua aspek ini telah mengalami penindasan dan mulai terungkap sejak reformasi tahun 1998, yang memerlukan perhatian dalam upaya *reintegrasi*.⁹

Wacana Demokrasi Dalam Masyarakat Madani

Islam tidak hanya sesuai dengan demokrasi tetapi juga memiliki karakteristik yang esensial dari demokrasi. Berdasarkan prinsip syura, sistem demokrasi dalam Islam menjamin terciptanya sistem politik yang adil dan seimbang karena mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang sejalan dengan syariat atau hukum Islam. dan mencerminkan kehendak Allah. Secara keseluruhan, Islam dianggap mempunyai unsur demokratis karena memberikan kebebasan kepada hakim-hakim untuk melakukan penilaian independen (ijtihad) dan mencapai kesepakatan bersama (ijma') di antara mereka sendiri.

Soetandyo memulai dengan mengulas konsep konseptual dari demokrasi. Menurut

⁸ Sufyanto, Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal.11.

⁹ Ernest Gellner, Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat menuju Kebebasan (Bandung: Mizan, 1995), hal.12.

pandangannya, demokrasi sering didefinisikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, kekuasaan memiliki implikasi politik dan administratif, sementara "rakyat" mengacu pada individu-individu dalam masyarakat yang dianggap sebagai warga negara. Walaupun demokrasi sering dianggap sebagai suatu hal yang ideal, pada kenyataannya seringkali muncul tantangan terkait dengan kompleksitas identitas sebenarnya dari rakyat dan bagaimana kekuasaan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat tersebut dijalankan.¹⁰

Dari sudut pandang teologis, musyawarah merupakan konsekuensi yang logis dari keyakinan tauhid dalam Islam, di mana Allah SWT dianggap sebagai Yang Maha Mengetahui, Maha Sempurna, Maha Mutlak, dan Maha Besar, sedangkan manusia memiliki sifat yang terbatas, tidak sempurna, dan bersifat relatif. Karena itu, dalam proses membuat keputusan atau mencari kebenaran, manusia membutuhkan bantuan pemikiran dan informasi dari orang lain melalui musyawarah. Orang yang bersikap otoriter dan menolak musyawarah berisiko menghadapi kehancuran karena menganggap memiliki pengetahuan dan kekuatan yang sebanding dengan kehendak Allah SWT.¹¹

Sejak zaman sebelum Islam, musyawarah telah ada dalam bentuk yang sangat sederhana. Tradisi semacam ini menjadi metode umum yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai keputusan. Meskipun pada masa itu istilah "syura" belum digunakan, proses ini melibatkan kegiatan musyawarah. Pendapat dari para pihak yang terlibat diminta dan dipertimbangkan. Setelah Islam mengajarkan ajarannya, tradisi dari zaman Jahiliyah diakui secara resmi. Agama Islam mendorong penggunaan musyawarah dalam semua aspek kehidupan. Dalam pandangan Islam, musyawarah seharusnya menjadi bagian dari praktik umat Islam di semua tingkatan masyarakat. Musyawarah adalah sebuah metode khusus yang bersumber dari ajaran tentang keesaan Tuhan.

Penulis berpendapat bahwa meskipun Islam tidak mengakui demokrasi dan menganggapnya berasal dari Barat, yang dikenal dalam Islam adalah konsep syura. Dalam syura, terdapat esensi dari prinsip demokrasi di mana fokusnya adalah pada kemampuan setiap individu untuk mengemukakan pendapat yang beragam. Ini menunjukkan bahwa dalam proses musyawarah (syura), nilai dan potensi manusia dihargai dan diberikan peran penting. Dalam konteks pemerintahan, pendapat serta pandangan rakyat dianggap serius, yang sesungguhnya merupakan inti dari prinsip demokrasi.¹²

Rafi Yunus mengatakan bahwa politik pada dasarnya melibatkan pengaturan administrasi pemerintahan negara. Menurutnya, seorang Muslim yang berkeinginan untuk terlibat dalam urusan negara sebaiknya tidak terlalu berambisi dalam mengejar jabatan kepemimpinan. KH. Muh. Rusyaid berpendapat bahwa ulama, terutama, tidak terlibat dalam mencalonkan diri untuk posisi politik. Keyakinannya adalah bahwa masyarakat madani aktif dalam kehidupan politik, yang didasarkan pada nilai-nilai Islam sebagaimana tertera dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.¹³

Menurut Syarifuddin Latif, keterlibatan ulama dalam urusan politik sebenarnya tidak

¹⁰ Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 1996), hal. 17.

¹¹ A. Q. Azizy, *Masyarakat Madani antara Cita dan Fakta Kajian Historis Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 25.

¹² Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 1996), hal. 18.

¹³ Ernest Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat menuju Kebebasan* (Bandung: Mizan, 1995), hal. 32.

diperlukan. Pandangan ini disengketakan oleh Said Mahmud dan Akzi Hamzah, yang menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri berperan sebagai seorang politikus. Pendapat ini didukung oleh Montgomery Watt dalam karyanya yang berjudul "Mohammad the Prophet". yang mengakui bahwa Muhammad tidak hanya sebagai pemimpin agama tetapi juga sebagai pemimpin negara atau masyarakat. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, para ulama seharusnya terlibat dalam politik untuk menunjukkan bahwa Islam membawa manfaat bagi dunia secara keseluruhan. Namun, mereka menekankan bahwa keterlibatan dalam politik harus didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan. yang diinginkan oleh Allah.¹⁴

Posisi politik yang paling tinggi adalah sebagai kepala negara, dan Rasulullah sendiri mengemban peran ini. Pandangan bahwa Islam tidak terlibat dalam politik tidak bisa diterima karena Rasulullah sendiri berfungsi sebagai pemimpin negara. Pendekatan semacam itu mencoba untuk memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari dengan membaginya menjadi dua wilayah terpisah: satu untuk masalah keagamaan yang hanya terbatas pada masjid dan sekitarnya., Pandangan ini dianggap berisiko karena dalam Islam, agama tidak hanya mempengaruhi urusan kehidupan umum termasuk politik, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam dipandang sebagai agama yang komprehensif yang memiliki pengaruh luas di semua aspek kehidupan, tanpa terkecuali.¹⁵

KESIMPULAN

Dari data yang di peroleh dari hasil survey responden menunjukkan bahwa responden sudah siap menuju masyarakat sipil dalam konteks demokrasi. Beberapa kelompok responden sudah menunjukkan tingkat kesiapan dan kemauan yang berbeda beda dalam mendukung masyarakat sipil dalam konteks demokrasi. diantaranya beberapa pihak sudah siap dan yakin dengan menunjukkan perlu adanya tindakan memperkuat masyarakat madani diantaranya seperti pemberantasan korupsi, penguatan hukum dan keadilan pada masyarakat, peningkatan kesejahteraan ekonomi, mendukung peningkatan transparansi pemerintah, dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. meskipun ada beberapa tantangan yang dapat menghambat masyarakat madani seperti korupsi, kesenjangan ekonomi,rendahnya pendidikan, kurangnya partisipasi masyarakat serta budaya yang tidak mendukung demokrasi.

Sehingga ada rekomendasi upaya yang di harapkan untuk dapat menggerakkan Indonesia menuju masyarakat beradab seperti adanya penguatan pendidikan kewarganegaraan, penguatan partisipasi politik, reformasi sistem politik, penegakan hukum yang adil, perlu adanya peran aktif dalam media para generasi muda dan masyarakat lainya serta kesadaran warga negara akan keberagaman dan kesadaran hak asasi manusia. Upaya ini yang dapat dilakukan dan di harapkan dapat membawa indonesia menuju masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan makmur di masa yang akan depan.

¹⁴ I. G. Sujatmiko, Wacana Civil Society di Indonesia, Jurnal Sosiologi edisi No. 9, 2001 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2001), hal. 43.

¹⁵ Muhammad AS. Hikam, Demokrasi dan Civil Society (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 1996), hal. 97.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, A. Q. (2002). *Masyarakat Madani antara Cita dan Fakta Kajian Historis Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, K. (2023). *Mengapa Masyarakat Madani Di Bumi Seribu Pura*. Surabaya: CV. Global Aksara Pers.
- Dr. Drs. HYRONIMUS ROWA, M. (2015). *DEMOKRASI DAN KEBANGSAAN INDONESIA*. Jatinagor: INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
- Gellner, E. (1995). *Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat menuju Kebebasan*. Bandung: Mizan.
- Hikam, M. A. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Ilma, M., & Alfian, R. N. (2020). Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Bingkai Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 25.
- Juliardi, B. (2020). Demokrasi dan Masyarakat Madani. *Jurnal BAKABA*, 8(2), 76.
- Manurung, C. E., Zee, C., Nathanael, N., & Ernando, R. (2022). Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk Kehidupan di Tahun 2022. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1(1), 3.
- Mujahidin, S. (2021). Masyarakat Madani Dan Politik Demokrasi Indonesia Telaah Singkat Civil Society Dalam Pendekatan Sosiologi Politik. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 4(2), 2.
- Rohmatillah, A., Sa'diyin, M., & Zaini, A. A. (2023). Tantangan dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. *JOSh: Journal of Sharia*, 2(2), 98.
- Sufyanto. (2001). *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujatmiko, I. G. (2001). *Wacana Civil Society di Indonesia, Jurnal Sosiologi edisi No. 9, 2001*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.